



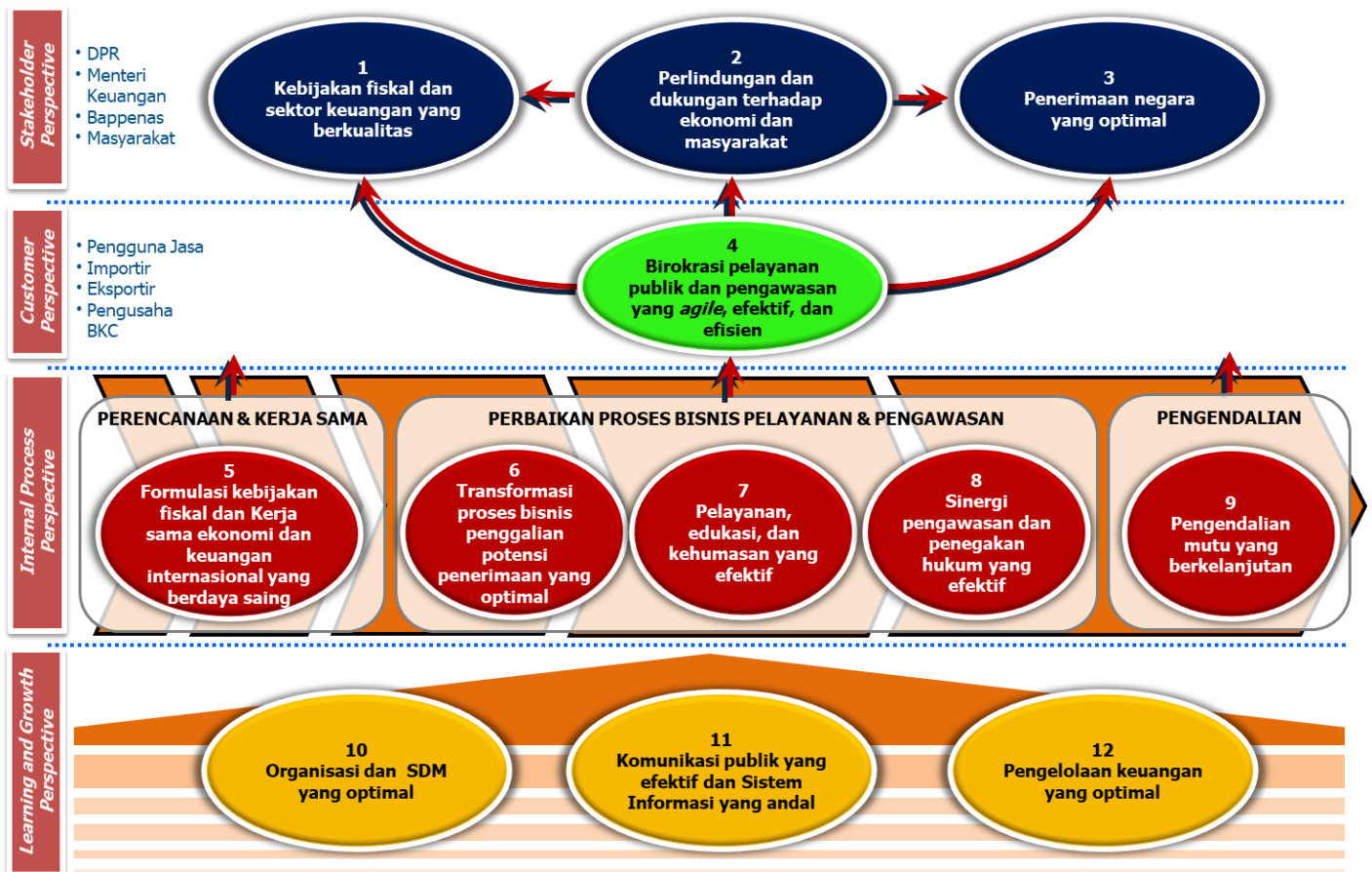
**KONTRAK KINERJA
NOMOR: 4/KK/2020
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berkualitas	1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	75
		1b-N	Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	2,8
2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat	2a-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	70%
3	Penerimaan negara yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%
4	Birokrasi pelayanan publik dan pengawasan yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	4 (Skala 5)
		4b-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	80%
		4b1-CP	Persentase kepatuhan importir	80%
		4b2-CP	Persentase kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor	80%
		4b3-CP	Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	80%
5	Formulasi kebijakan fiskal dan Kerjasama ekonomi dan keuangan internasional yang berdaya saing	5a-CP	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100
		5b-CP	Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional	100%
6	Transformasi proses bisnis dan penggalan potensi penerimaan yang optimal	6a-CP	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	100%
		6b-CP	Indeks implementasi <i>Indonesian Single Risk Management</i> (ISRM)	100
		6c-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	85%
7	Pelayanan, edukasi, dan kehumasan yang efektif	7a-N	Persentase berita negatif oleh media nasional terpercaya	2,5%
8	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	8a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	74,67%
		8a1-CP	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	70%
		8a2-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	79%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
		8a3-CP	Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai	75%
		8b-N	Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak	38%
9	Pengendalian mutu yang berkelanjutan	9a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89%
10	Organisasi dan SDM yang optimal	10a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	92,98%
		10b-CP	Persentase implementasi <i>Delayering</i>	100%
		10c-CP	Persentase efisiensi belanja birokrasi	10%
		10d-CP	Indeks integritas organisasi	93,49
		10d1-CP	Indeks persepsi integritas	86,98
		10d2-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK/WBBM	100
		10e-CP	Persentase penyelesaian program RBTK	85%
		10f-CP	Tingkat implementasi <i>learning organisation</i>	75
11	Komunikasi publik yang efektif dan Sistem Informasi yang andal	11a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	2,9 (Skala 4)
		11b-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100
		11b1-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	100 (0,1%)
		11b2-CP	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	100 (85%)
12	Pengelolaan keuangan yang optimal	12a-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	85
		12b-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

Kegiatan

Kegiatan	Anggaran
1. Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai	Rp 63.305.666.000
2. Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanaan dan Cukai	Rp 10.985.863.000
3. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Cukai	Rp 353.899.965.000
4. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Fasilitas Kepabeanaan	Rp 3.319.920.000
5. Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanaan dan Cukai	Rp 92.862.532.000
6. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerjasama Internasional, serta komunikasi dan informasi publik di bidang Kepabeanaan dan Cukai	Rp 29.947.963.000

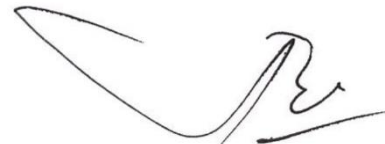
Kegiatan	Anggaran
7. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Keberatan Banding dan Peraturan	Rp 8.927.137.000
8. Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai	Rp 284.566.342.000
9. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Teknis Kepabeanan	Rp 5.268.789.000
10. Pembinaan pelaksanaan pengawasan, pelayanan dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai di daerah	Rp 379.503.505.000
11. Pelaksanaan pengawasan, pelayanan dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai di daerah	Rp 1.194.659.647.000
12. Pelaksanaan pengawasan, pelayanan dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai Utama	Rp 222.030.498.000
13. Pelayanan Pangkalan Sarana Operasi	Rp 367.439.688.000
14. Pelaksanaan Perbantuan Hubungan dan Kerjasama di bidang Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan Luar Negeri	Rp 10.607.154.000
15. Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal	Rp 4.785.498.000
16. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC	Rp 584.996.174.000
17. Perumusan Kebijakan Pengelolaan Penerimaan ,Manajemen Risiko, Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi Bea dan Cukai	Rp 4.610.194.000

Menteri Keuangan,



Sri Mulyani Indrawati

Jakarta, 29 Januari 2020
Direktur Jenderal Bea dan Cukai,



Heru Pambudi

**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2020**

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berkualitas							
1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	35	50	50	65	65	75	75
1b-N	Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat							
2a-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	15%	30%	30%	50%	50%	70%	70%
3	Penerimaan negara yang optimal							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	18,34%	44,24%	44,24%	67,37%	67,37%	100%	100%
4	Birokrasi pelayanan publik dan pengawasan yang <i>agile</i>, efektif, dan efisien							
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	-	-	-	-	-	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)
4b-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
4b1-CP	Persentase kepatuhan importir	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
4b2-CP	Persentase kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
4b3-CP	Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5	Formulasi kebijakan fiskal dan Kerjasama ekonomi dan keuangan internasional yang berdaya saing							
5a-CP	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	-	60	60	80	80	100	100
5b-CP	Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional	-	100%	100%	-	100%	100%	100%

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Transformasi proses bisnis dan penggalian potensi penerimaan yang optimal							
6a-CP	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	10%	25%	25%	70%	70%	100%	100%
6b-CP	Indeks implementasi <i>Indonesian Single Risk Management</i> (ISRM)	10	25	25	70	70	100	100
6c-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	5%	20%	20%	50%	50%	85%	85%
7	Pelayanan, edukasi, dan kehumasan yang efektif							
7a-N	Persentase berita negatif oleh media nasional terpercaya	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
8	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif							
8a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	18,33%	33,33%	33,33%	53,33%	53,33%	74,67%	74,67%
8a1-CP	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	30%	40%	40%	50%	50%	70%	70%
8a2-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	10%	30%	30%	60%	60%	79%	79%
8a3-CP	Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	15%	30%	30%	50%	50%	75%	75%
8b-N	Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak	38%	38%	38%	38%	38%	38%	38%
9	Pengendalian mutu yang berkelanjutan							
9a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	89%	89%
10	Organisasi dan SDM yang optimal							
10a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	-	92,98 %	92,98 %	-	92,98 %	92,98 %	92,98 %

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
10b-CP	Persentase implementasi <i>Delayering</i>	40%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
10c-CP	Persentase efisiensi belanja birokrasi	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
10d-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	93,49	93,49
10d1-CP	Indeks persepsi integritas	-	-	-	-	-	86,98	86,98
10d2-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100
10e-CP	Persentase penyelesaian program RBTK	10,32%	22,20%	22,20%	32,83%	32,83%	85%	85%
10f-CP	Tingkat implementasi <i>learning organisation</i>	-	-	-	-	-	75	75
11	Komunikasi publik yang efektif dan Sistem Informasi yang andal							
11a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	-	2,9	2,9	-	2,9	2,9	2,9 (Skala 4)
11b-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100	100	100	100	100	100	100
11b1-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	100 (0,1%)	100 (0,1%)	100 (0,1%)	100 (0,1%)	100 (0,1%)	100 (0,1%)	100 (0,1%)
11b2-CP	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	-	-	-	-	-	100 (85%)	100 (85%)
12	Pengelolaan keuangan yang optimal							
12a-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	-	70	70	-	70	85	85
12b-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Jakarta, 29 Januari 2020

PNS yang dinilai,



Heru Pambudi

**INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020**

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Penerimaan negara yang optimal	Peningkatan Kelancaran Logistik dan Perdagangan di Perbatasan serta Percepatan Pelayanan e-Commerce dan Transshipment	9 Laporan	Q1: Edukasi dan asistensi penerapan ketentuan, penelitian dan peninjauan lapangan. Q2: Rapat koordinasi dan sosialisasi Q3: Asistensi pelaksanaan ketentuan Q4: monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketentuan	Q1: 2 laporan Q2: 4 laporan Q3: 6 laporan Q4: 9 laporan	Januari – Desember 2020	Direktorat Teknis Kepabeanan	Rp 583.478.000.-
2	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berkualitas	WCO <i>Technology Conference</i> 2020	1 Rekomendasi	Q1 : Persiapan penyelenggaraan seperti rapat panitia, <i>conference call meeting</i> dengan WCO, rapat vendor. Q2: Melakukan persiapan <i>branding</i> , logistik, transportasi, <i>pre-event</i> publikasi <i>all channels</i> dan <i>launching video teaser</i> . Registrasi dan pelaksana pertemuan. Q3-Q4: Penyusunan laporan dan rekomendasi	Q1: - Q2: - Q3: - Q4: 1 rekomendasi	Januari – Desember 2020	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	Rp 6.470.520.000.-
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Penguatan Unit Anjing Pelacak Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	1 Sistem	Q1: Modernisasi infrastruktur dan sarana prasarana unit K9 Kantor Pusat DJBC dan pelatihan instruktur anjing pelacak dan studi banding metode pelatihan dan pelacakan <i>Container Outdoor Extraction</i> Q2: Modernisasi pelatihan (lanjutan) anjing pelacak <i>Marine Dog/ Container Dog/ Border Dog</i> Q3: Modernisasi infrastruktur dan sarana prasarana unit K9 Kantor	Q1: - Q2: - Q3: - Q4: 1 sistem	Januari – Desember 2020	Direktorat Penindakan dan Penyidikan	Rp 57.995.774.000.-

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)	
				Pusat DJBC (lanjutan) Q4: Modernisasi infrastruktur dan sarana prasarana unit K9 Kantor Pusat DJBC (penyelesaian) dan pelatihan teknis pawang anjing pelacak (Narkotik, Currency, Tabacco)				
4	Komunikasi publik yang efektif dan Sistem Informasi yang andal	CEISA 4.0 National Logistic Enabler	1 Sistem	Q1: Proses pelelangan (mulai dari pengajuan ke ULP sampai dengan tanda tangan kontrak Q2 - Q4 : Kick off dan UAT (User Acceptance Test)	Q1: - Q2: - Q3: - Q4: 1 sistem	Januari - Desember 2020	Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai	Rp 48.028.083.000.-

Jakarta, 29 Januari 2020

PNS yang dinilai,



Heru Pambudi

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Sri Mulyani Indrawati	1	Nama	Heru Pambudi
2	NIP	-	2	NIP	19700211 198912 1 001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	-	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Madya/ IV/d
4	Jabatan	Menteri Keuangan	4	Jabatan	Direktur Jenderal
5	Unit Kerja	Kementerian Keuangan	5	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Merumuskan kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif	-	75	100	12 bulan	-
2	Memenuhi rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	-	2,8	100	12 bulan	-
3	Mengawasi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	-	70%	100	12 bulan	-
4	Mencapai target penerimaan negara	-	100%	100	12 bulan	-
5	Memenuhi kepuasan pengguna layanan	-	4 (Skala 5)	100	12 bulan	-
6	Meningkatkan kepatuhan pengguna jasa atas aturan kepabeanan dan cukai	-	80%	100	12 bulan	-
7	Menyelesaikan penyusunan kebijakan/regulasi prioritas	-	100	100	12 bulan	-
8	Mewujudkan pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional	-	100%	100	12 bulan	-
9	Mengimplementasikan transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	-	100%	100	12 bulan	-
10	Mengimplementasikan <i>Indonesian Single Risk Management</i> (ISRM)	-	100	100	12 bulan	-
11	Memenuhi keberhasilan <i>Joint Program</i>	-	85%	100	12 bulan	-
12	Mengelola berita negatif oleh media nasional terpercaya	-	2,5%	100	12 bulan	-
13	Melakukan pengawasan kepabeanan dan cukai secara efektif	-	74,67%	100	12 bulan	-
14	Memenangkan sengketa banding di pengadilan pajak	-	38%	100	12 bulan	-
15	Menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	-	89%	100	12 bulan	-

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
16	Meningkatkan pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	-	92,98%	100	12 bulan	-
17	Menyelesaikan implementasi <i>Delayering</i>	-	100%	100	12 bulan	-
18	Melaksanakan belanja birokrasi yang efisien	-	10%	100	12 bulan	-
19	Mewujudkan organisasi yang berintegritas tinggi	-	93,49	100	12 bulan	-
20	Menyelesaikan program RBTK	-	85%	100	12 bulan	-
21	Mengimplementasikan <i>learning organisation</i>	-	75	100	12 bulan	-
22	Mewujudkan komunikasi publik yang efektif	-	2,9 (Skala 4)	100	12 bulan	-
23	Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem TIK	-	100	100	12 bulan	-
24	Menyusun laporan keuangan BA 15 yang berkualitas	-	85	100	12 bulan	-
25	Mewujudkan pelaksanaan anggaran yang berkualitas	-	95%	100	12 bulan	Rp 2,674 T

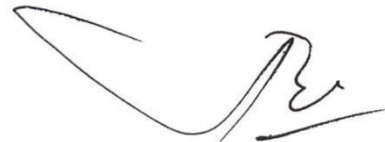
Pejabat Penilai,



Sri Mulyani Indrawati

Jakarta, 29 Januari 2020

PNS yang dinilai,



Heru Pambudi
NIP 19700211 198912 1 001